



Pemerintah Kota
Padang Panjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat-Nya penulisan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

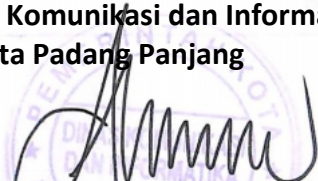
Laporan kinerja atau LKJIP merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2019-2023 yang diuraikan dalam bentuk pencapaian target target indikator sasaran strategis sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Dalam Laporan Kinerja ini juga diuraikan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja pada tahun sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sudah memuaskan, untuk itu kinerja ini harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019, selain menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi, dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang agar pelaksanaan kinerja ke depan berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

Padang Panjang, Januari 2020

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**


Drs. AMPERA, SH.M.Si
NIP. 196810703 198203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban OPD atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam LKjIP ini dipaparkan evaluasi atas capaian dan tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019, yang berguna sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan:

1. Sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban, dan sekaligus sebagai media peningkatan kinerja.
2. Untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang periode tahun 2019
3. Agar sumber-sumber anggaran yang dialokasikan penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien pemakaiannya.
4. Sebagai dasar penilaian kinerja dan pedoman dalam meningkatkan kinerja.

Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini bertujuan :

1. Sebagai indikator dalam melihat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Dapat menjadi acuan dalam menyusun Lakip Pemerintah Kota Padang Panjang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang.
3. Sebagai program strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.

C. Penjelasan Umum Organisasi

C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.
- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. **Bidang E-Government dan Teknologi Informasi**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Pengelolaan E-Government, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian

- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- b. **Seksi Statistik**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi AStatistik.
- c. **Seksi Layanan Aplikasi**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Aplikasi.

- 4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

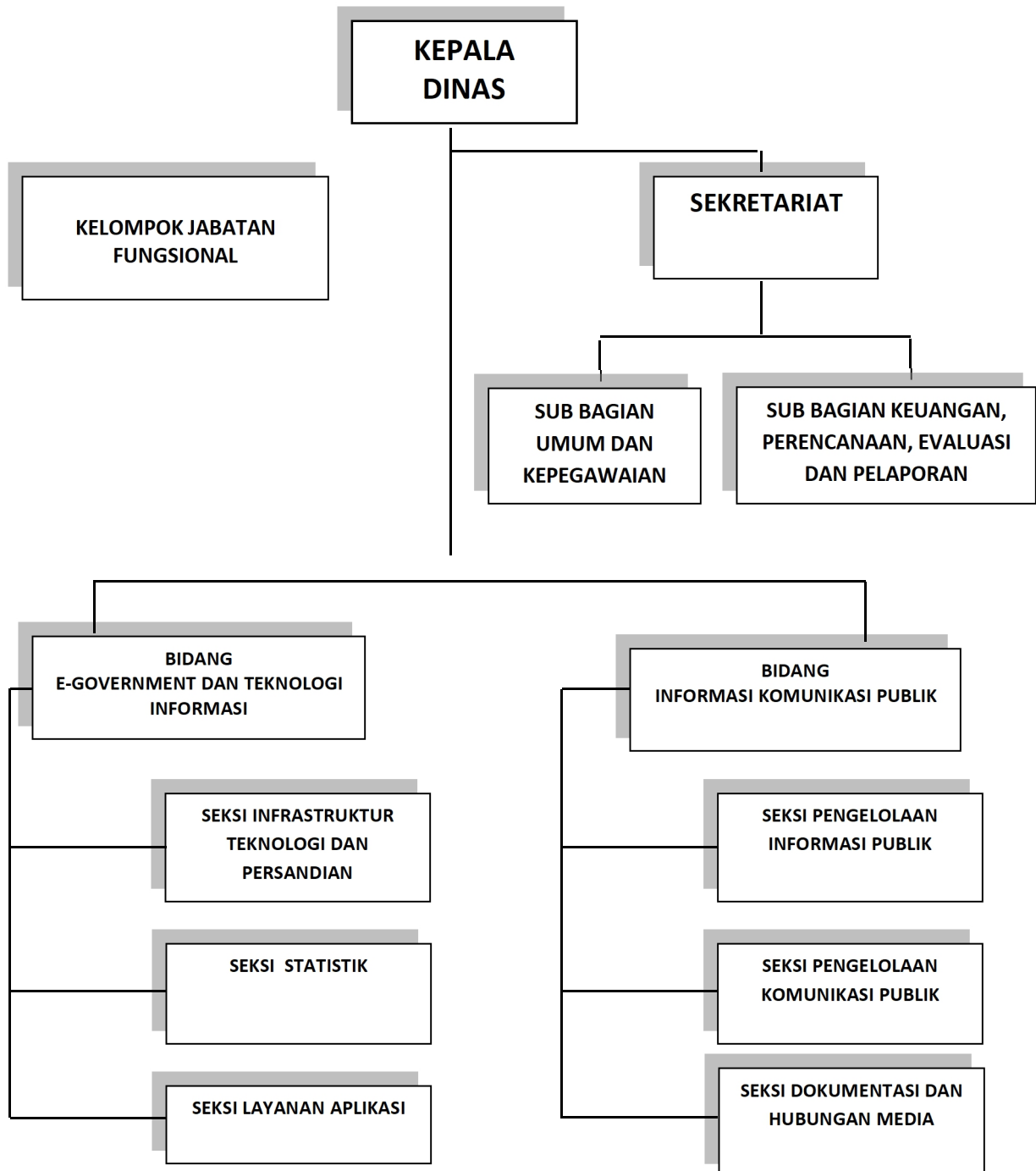
- a. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Lingkup Pemerintah Daerah.

- b. **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengendalian komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- c. **Seksi Dokumentasi dan Hubungan Media**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan hubungan dengan media.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG



C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil (aparatur) yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-harinya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada akhir tahun 2019, berjumlah sebanyak 61 (Enam puluh satu) orang, yang terdistribusi pada Sekretariat dan Bidang. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 21 orang atau 34 % berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan sebanyak 40 orang atau 66 % berstatus pegawai harian. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menunjukkan sebanyak 16 (enam belas) orang atau 76 % berstatus pegawai negeri sipil yang telah menamatkan pendidikan kesarjanaaan (D.III hingga S2).

Sumber daya manusia pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	2
3	Strata 1	13
4	Diploma 3	7
5	Diploma 2	-
6	Diploma 1	-
7	SLTA	4
8	SLTP	-
9	SD	-
	Jumlah	26

Sedangkan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilihat dari tingkat kepangkatannya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1. 2
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Tingkat Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pembina Utama Muda / IV.c	1
2	Pembina Tingkat I / IV.b	2
3	Pembina / IV.a	1
4	Penata Tingkat I / III.d	6
5	Penata / III.c	3

6	Penata Muda Tingkat I / III.b	6
7	Penata Muda / III.a	5
8	Pengatur Tingkat I / II.d	1
9	Pengatur / II.c	3
10	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	-
11	Pengatur Muda / II.a	-
12	Juru Tingkat I / I.d	-
13	Juru / I.c	-
14	Juru Muda Tingkat I / I.b	-
15	Juru Muda / I.a	-
	J u m l a h	26

Terkait dengan tingginya intensitas kerja dibidang Teknologi Informasi, dan kebutuhan akan tenaga teknis yang belum ditempati oleh formasi ASN, maka direkrutlah Tenaga Harian Lepas terutama untuk beberapa posisi teknis. Berikut data terkait dengan keberadaan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Tabel 1. 3
Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2020

Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
Sekretariat	Sopir	2
	Penjaga Kantor	2
	Tenaga kebersihan	4
Bidang IKP	Tenaga Pemasaran	2
	Tenaga pengolah data PPID	4
	Pengelola data komunikasi	1
	Tenaga Liputan	5
	Tenaga humas	1
Bidang E Government dan TI	Tenaga teknis multimedia kota	3
	programmer	6
	Teknisi jaringan kota	3

	Teknisi jaringan	2
	Operator (dashboard system/aplikasi)	9
	Pengelola data	1
	Jumlah	45

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKj IP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Penetapan Kinerja Dinas, Kominfo Tahun 2019

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2019

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Visi dan Misi

Visi dan misi Walikota Padang Panjang periode 2019-2023, merupakan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD. Visi misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu :

1. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
3. Kesehatan : Padang Panjang Sehat dan Bahagia
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Kominfo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-3 RPJMD yakni **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif** yang selanjutnya diwujudkan melalui sasaran **Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

Salah satu indikator dalam pencapaian sasaran RPJMD terkait kinerja pemerintahan ini adalah meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dalam hal ini dimaksudkan adalah terlaksananya berbagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur sehingga tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang cerdas (Smart City) melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana melalui pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan akan terwujud pembaharuan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari visi dan misi pembangunan, serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Beranjak dari pencapaian misi ke 3 dan sasaran RPJMD dirumuskan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai berikut : **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi**

Untuk mencapai tujuan untuk diwujudkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

Tujuan, sasaran berikut indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk tahun 2020 tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2020 dan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
				2020
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi		Indeks SPBE	2,65
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,65
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	74 (Cukup Informatif)
		Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	30%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

A.1 Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja untuk mendukung 3 (tiga) sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terlihat dari tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya pemerintahan responsif, efisien, transparan dan berbasis	kinerja yang efektif, partisipatif teknologi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,65	3,01	114%

informasi						
2	Meningkatnya Keterbukaan Publik	Informasi	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	74	80	109%
3	Tersedianya data sektoral yang memenuhi prinsip satu data sektoral	Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	30%	33%	110%

Berdasarkan tabel di atas pencapaian kinerja untuk masing masing sasaran strategis dapat di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

Tabel 3.2

Evaluasi pencapaian sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,65	3,01	114%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target sebesar 2,65. Penilaian indeks ini dilakukan melalui evaluasi secara mandiri (self assesment) oleh Dinas Kominfo dengan mempedomani Permenpan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian SPBE ini meliputi 3 domain, yakni kebijakan, tatakelola dan layanan. Nilai Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5.0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Berdasarkan hasil self assesment tersebut diperoleh nilai indeks SPBE Kota Padang Panjang pada tahun 2020 sebesar 3,01 dalam artian “baik”. Penilaian SPBE ini meliputi 3 domain, yakni kebijakan, tatakelola dan layanan.

Perolehan nilai untuk masing masing domain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Domain	Nilai/Indeks
Kebijakan	2,94
Tata kelola	2,00
layanan	3,55
Total	3,01

Untuk Domain kebijakan diperoleh nilai sebesar 2, 94. Indeks ini diperoleh dari pengukuran terhadap 2 aspek dan 17 indikator yang berkaitan dengan ketersediaan dokumen pendukung dan legalitas pelaksanaan SPBE pada unit layanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Indeks penilaian dari 17 indikator tersebut rata rata 3 (dalam artian baik) kecuali pada 2 indikator terkait kepegawaian dan pengaduan publik. Hal ini terkait dengan belum tersedianya regulasi pada layanan kepegawaian dan layanan pengaduan publik.

Sementara itu untuk domain tata kelola diperoleh nilai indeks sebesar 2,0. Pengukuran indeks ini dilakukan terhadap 3 aspek dan 7 indikator yang berkaitan dengan standar operasional prosedur organisasi (SOP) untuk berjalannya SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dari 7 indikator tersebut rata rata bernilai 2 (dalam artian cukup), kecuali pada indikator Rencana Induk yang bernilai 1 (dalam artian

kurang). Hal ini dikarenakan belum disusunnya Rencana Induk SPBE Kota Padang Panjang terkait belum tersedianya Rencana Arsitektur SPBE nasional dan provinsi.

Untuk domain layanan diperoleh nilai sebesar 3,55. Pengukuran indeks ini dilakukan terhadap 2 aspek dan 13 indikator. Secara umum, nilai rata rata dari masing masing indikator 3 (baik) bahkan pada beberapa indikator terkait naskah dinas, kepegawaian, jdih, dan layanan publik mendapat nilai 4 dan terkait pengadaan mendapat nilai 5. Hal ini dapat terlihat dari berbagai layanan yang ada sudah saling terintegrasi, contoh untuk layanan manajemen kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan layanan naskah dinas, layanan penilaian kinerja. Begitu juga dengan layanan kependudukan yang sudah terintegrasi dengan layanan administrasi sipil lainnya.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun sebelumnya

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator	
		2018	2019
1	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,67	3,01

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan indeks SPBE dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dan target Renstra

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

No	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi s.d 2020	Capaian %
1	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3,01	100,34%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja pada tahun 2020 ini dikaitkan dengan target di akhir tahun Renstra sudah mencapai 100,34%, dimana dari target akhir nilai indeks “3” pada tahun ini sudah diraih indeks sebesar “ 3,01”.

Dari beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran ini sudah sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini dapat terlihat dengan tingginya persentase capaian bahkan melewati target akhir pada tahun 2023.

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan untuk menyusun dokumen pendukung terkait dengan domain kebijakan dalam Indeks SPBE, dengan disahkannya beberapa regulasi dalam rangka implementasi beragam layanan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Partisipasi aktif dari unit layanan pengelola SPBE (OPD) dalam menyelenggarakan SPBE.
3. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan layanan berbasis elektronik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 3.7

Evaluasi pencapaian sasaran strategis : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	74 (Cukup informatif)	80 (Menuju informatif)	109%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan target sebesar 74% dalam artian **“cukup informatif”**. Berdasarkan hasil assesment Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat terhadap badan layanan publik (PPID) Kota Padang Panjang, diperoleh hasil Persentase Keterbukaan Informasi Publik sebesar 80% dalam artian **“menuju informatif”** dengan capaian kinerja sebesar 109%.

Ada 3 (tiga) indikator utama yang dijadikan KI dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang meliputi penyebaran questioner, penilaian website dan data dukung serta penilaian visitasi (kunjungan lapangan) yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020. Hasil penilaian untuk masing masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

No	Indikator	Nilai
----	-----------	-------

1	Quesioner	10%
2	Verifikasi Website dan Data Dukung	53%
3	Visitasi	17%
	Total	80%

Dari penilaian pemeringkatan badan publik tersebut, Kota Padang Panjang meraih peringkat 4 dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun sebelumnya
Sasaran Srategis 2: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator	
		2019	2020
1	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	78,8 (Cukup informatif)	80 (Menuju Informatif)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan nilai Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dibanding tahun sebelumnya dan kategori pemeringkatan sebelumnya cukup informatif menjadi menuju informatif untuk capaian tahun 2020.

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja dan target Renstra

Sasaran Srategis 2: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi s.d 2020	Capaian %
1	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	84% (Menuju informatif)	80% (Menuju informatif)	95,2%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja pada tahun 2020 ini dikaitkan dengan target di akhir tahun Renstra sudah mencapai 95,2%, dimana dari target akhir nilai persentase sebesar 84% pada tahun ini sudah terealisasi sebesar 80%.

Dari beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran ini sudah sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini dapat terlihat dengan tingginya persentase capaian. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Komitmen, konsistensi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi antara Pimpinan dan stakeholder terkait dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2. Daftar Informasi Publik (DIP) yang meningkat secara signifikan

Hal ini didukung oleh adanya dan koordinasi dan pembinaan yang intensif oleh Dinas Kominfo selaku PPID Utama terhadap PPID pembantu (OPD) dalam memperbarui dan menambah Daftar Informasi Publik, dan juga partisipasi dan dukungan dari stakeholder terkait.

3. Tersedianya saluran informasi berbasis web dalam penyebaran informasi publik kepada masyarakat.

PPID padang panjang menyajikan data informasi Covid secara up to date di covid.padangpanjang.go.id dan untuk penyaluran bansos juga disampaikan secara terperinci (by name by adress) melalui bansos.padangpanjang.go.id

4. Tersedianya berbagai saluran pengaduan masyarakat berupa :

- layanan call center 112
- layanan lapor wali
- rumah aspirasi, dan
- layanan pengaduan melalui medsos
- layanan pengaduan langsung melalui PPID Utama Kota Padang Panjang (Dinas Kominfo).

Sasaran 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

Tabel 3.11

Evaluasi pencapaian sasaran strategis 3 :

Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	30%	33%	110%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi sebanyak 30 %, dan terealisasi sebesar 33 % atau dengan capaian kinerja 110%. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui evaluasi terhadap persentase jumlah OPD yang telah mempublikasikan data statistik sektoralnya melalui aplikasi Udajang. Dari 24 OPD yang ada, 8 (delapan) OPD sudah mempublikasikan data statistik sektoralnya, yakni

1. Dinas Kominfo
2. BKPSDM
3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,
4. Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Dinas Kesehatan
6. RSUD
7. BPKD
8. Dinas Sosial

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun sebelumnya

Sasaran Srategis 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator	
		2019	2020
1	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	21%	33%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan nilai Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja dan target Renstra

Sasaran Srategis 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

No	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi s.d 2020	Capaian %
1	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	40%	33%	82,5%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja pada tahun 2020 ini dikaitkan dengan target di akhir tahun Renstra sudah mencapai 82,5%, dimana dari target akhir nilai persentase sebesar 40% pada tahun ini sudah terealisasi sebesar 33%.

Dari beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran ini sudah sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini dapat terlihat dengan tingginya persentase capaian. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Penerapan sistim bagi pakai (interoperabilitas) lintas instansi dengan menggunakan aplikasi Simdasi milik BPS dan beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi sangat membantu proses pengumpulan data melalui teknologi.
2. Meningkatnya partisipasi OPD akan pentingnya penyediaan data dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan.
3. Adanya optimalisasi aplikasi udajang sehingga mempermudah diseminasi informasi statistik melalui satu portal.
4. Meningkatnya koordinasi, dan asistensi dengan BPS Kota Padang Panjang selaku pembina statistik sektoral, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bappeda dan Dinas Kominfo Provinsi Sumbar.

A.2 Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Program

A.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Program E Government

Pencapaian indikator kinerja program pada program EGovernment dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.7

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	E Government	indeks implementasi tata kelola SPBE	1,75	2	115%
		indeks implementasi layanan SPBE	2,4	3,55	148%

Pengukuran terhadap indikator ini merupakan bagian dari penilaian SPBE, dimana diperoleh indeks implementasi tata kelola SPBE sebesar 2 dan indeks implementasi layanan SPBE sebesar 3,55. Dalam artian capaian terhadap indikator ini adalah sebesar 115 % untuk indeks tata kelola dan 148% untuk indeks implementasi layanan SPBE.

Adapun yang menjadi faktor pendukung terhadap capaian indikator ikinerja program ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya kelembagaan tim pengarah SPBE yang sesuai arahan Permenpan Nomor 5 Tahun 2018 merupakan unsur wajib dalam pengelolaan SPBE.

2. Telah mulai beroperasionalnya pusat data kota pada Data Center Kominfo di kompleks Command Center Kota Padang Panjang.

A.2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Pencapaian indikator kinerja pada program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.8

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik	2,6	2,65	100%

Pengukuran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik ini dilakukan menggunakan aplikasi *klip.padangpanjang.go.id* yang mencakup berbagai layanan informasi publik meliputi, layanan PPID, kehumasan, layanan 112, publikasi dan informasi, jaringan metronet, layanan Command Centre, dan penyajian data dan statistik sektoral.

Sebaran questioner menggunakan aplikasi ini sudah dilaksanakan sejak bulan April hingga bulan Desember 2020, yang melibatkan responden dari berbagai latarbelakang pekerjaan dengan total responden sebanyak 51 orang. Dari target

IKM sebesar 2, 65 terealisasi sebesar 2,653 dalam artian capaian kinerja sebesar 100% sesuai target.

Adapun yang menjadi faktor pendukung terhadap capaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen untuk memberikan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan pembangunan daerah.
2. Tersedianya sarana aplikasi dalam rangka menyebarkan questioner dan survey untuk responden dalam memberikan tanggapan untuk kepuasan layanan informasi publik.
3. Adanya penyebaran informasi publik secara massif melalui media sosial.

A.2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Program Persandian dan Pengamanan Informasi

Pencapaian indikator kinerja pada program Persandian dan Pengamanan Informasi dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.9

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital	57%	59%	104 %

Pengukuran indikator ini dilakukan pada sejumlah layanan SPBE yang sudah menerapkan tandatangan digital. Dari 12 layanan SPBE, ada 6 layanan yang sudah menggunakan tandatangan digital pada tahun 2020.

Adapun layanan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

1. Layanan kependudukan
2. Layanan informasi hukum
3. Layanan perizinan
4. Layanan naskah dinas
5. Layanan manajemen kepegawaian
6. Layanan kearsipan
7. Layanan informasi (PPID).

Adapun yang menjadi faktor pendukung terhadap capaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan untuk percepatan implementasi pengamanan informasi melalui penggunaan tandatangan digital.
2. Partisipasi aktif dari unit layanan pengelola SPBE (OPD) terkait.

A.2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah

Pencapaian indikator kinerja pada program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.10

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	persentase elemen data statistik sektoral yang tersedia	81,5%	75%	92%

Realisasi untuk I ndikator program ini adalah sebesar 75% atau dengan capaian sebesar 92%.

Adapun yang menjadi faktor pendukung capaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya beberapa OPD yang belum menyelesaikan tabulasi datanya untuk dikompilasi menjadi data statistik sektoral

Dari 4 (empat) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada Tahun 2020, terlihat bahwa capaian kinerja program OPD sudah cukup baik, dimana 3 (tiga) program melebihi target atau di atas 100% dan hanya 1 (satu) program yang terealisasi di bawah target. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pada Dinas Kominfo untuk tahun 2020 ini sudah berjalan dengan baik.

A. Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.11

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Kode		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Program	Kode				K	%		K	%
1	2	3	4	5	6		7	8	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%				
	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 unit kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	3 unit kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	100%	110.290.000	108.496.000	98%
	04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara/dibersihkan	1 Unit	1 Unit	100%	162.870.000	159.590.820	98%
	07	Penyediaan Makan dan Minum	jumlah makan dan minum rapat yang	1325 ok	1325 ok	100%	26.500.000	26.493.600	100%

			disediakan						
	08	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	125 ok	157 ok	126%	144.208.000	1.436.888.554	996%
	18	Penyediaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis dokumen perencanaan dan laporan kinerja daerah Jumlah jenis laporan keuangan	2 (Jenis) 3 (Jenis) 3 (Jenis) 22 (Jenis)	2 (Jenis) 3 (Jenis) 3 (Jenis) 22 (Jenis)	100%	33.000.000	32.405.250	98%
	19	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	jumlah tagihan rekening yang dbayarkan/jumlah jenis pengadaan alat listrik	3 jenis I 4 jenis	3 jenis I 4 jenis	100%	133.400.000	99.921.570	75%
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%				
	27	Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Kantor	jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	100%	147.850.000	144.696.249	98%
07		PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,65	2,65	2,65			
	02	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang aktif	2 kelompok	2 kelompok	100%	28.113.060	25.294.568	90%

		Kota Padang Panjang							
	03	Pembinaan dan Pengembangan Media Tradisional	Jumlah Media Tradisional yang dibina	-	-	0	-	-	0%
	09	Penayangan Dialog Interaktif pada Media Televisi	Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui pemanfaatan media televisi	4 dialog interaktif	4 dialog interaktif	100%	18.300.000	14.000.000	77%
	04	Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	jumlah release berita mengenai informasi aktual di Lingkungan Pemko Padang Panjang melalui pemanfaatan media sosial	450 release berita	1360 release berita	302%	221.722.000	218.441.039	99%
	05	Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron	Jumlah konten videotron (non komersil) dan peningkatan PAD Kota Padang Panjang melalui komersialisasi videotron	275 konten	692 konten	252%	320.023.880	317.496.069	99%
	06	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Jumlah OPD yang sudah mengelola Daftar Informasi Publik	14 OPD	14 OPD	100%	88.580.960	88.317.309	100%
	10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah jenis media yang mempublikasikan informasi kegiatan pembangunan daerah	5 Jenis	5 Jenis		1.730.000.000	1.707.923.900	99%
06		PROGRAM E-	Indeks implementasi tata kelola SPBE dan Indeks	1,75/2,4	1,75/2,4				

		GOVERNMENT	implementasi layanan SPBE						
	02	Pengelolaan Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Node Akses Intenet yang dikelola	72 Node (28 titik OPD, 16 Kelurahan, 6 UPTD, 2 Videotron, 17 CCTV)	115 node	160%	1.402.900.000	1.308.449.318	93%
	01	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi (Command Centre)	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	6 Jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 11 Server, 69 acces point dan 69 buah router, 17 unit CCTV, 1 paket Command Center)	6 Jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 11 Server, 69 acces point dan 69 buah router, 17 unit CCTV, 1 paket Command Center)	100%	1.015.544.680	993.098.356	98%
	05	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Padang Panjang Smart City	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	12 aplikasi terintegrasi dalam manajemen smart city	12 aplikasi terintegrasi dalam manajemen smart city	100%	353.072.240	339.289.059	96%
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH	persentase elemen data statistik sektoral yang tersedia	81,50%	81,50%				
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	2 dokumen (PDRB dan PPDA)	2 dokumen (PDRB dan PPDA)	100%	26.995.000	20.899.200	77%

06		PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital	57%	57%				
	01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	100%	7.300.000	-	0%

B. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan. Keberhasilan capaian indikator kinerja keuangan diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp. 8.583.169.820,- dari jumlah tersebut telah dapat direalisasikan sebesar 8.182.500.648,- atau 95,33%.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung				
	- Belanja Pegawai				93,17
		- 2.612.500.000,00	2.433.999.351,00	178.500.649,00	
2	Belanja Langsung				
		82.538.150,-	73.640.715,-	8.897.135,-	89,2
		5.655.429.000,-	4.896.024.326,-	759.404.674,-	86,6
		36.240.000,-	36.211.100,-	28.900,-	99,9
	- Belanja pegawai	00,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja barang & jasa	5.436.619.820,00	5.235.060.797,00	201.559.023,00	96,29
	- Belanja Modal	534.050.000,00	513.440.500,00	20.609.500,00	96,14
	J u m l a h	8.583.169.820,00	8.182.500.648,00	400.669.172,00	95,33

Realisasi anggaran sebesar Rp.8.182.500.648,-atau 95,33 % dibawah anggaran yang dikarenakan ada efisiensi pada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target.

Akuntabilitas keuangan berdasarkan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	indeks SPBE	2,65	3,01	114%	Program E Government			
						1. Pengelolaan Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang	Rp1.402.900.000	Rp1.308.449.318	93%
						2. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi (Command Centre)	Rp1.015.544.680	Rp993.096.356	98%
						3. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Padang Panjang Smart City	Rp353.072.240	Rp339.289.059	96%
						Program Persandian dan Pengamanan Informasi			

						1.Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp7.300.000	Rp-	0%
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	74 (Cukup Informatif)	80	108%	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik			
						1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang	Rp28.113.060	Rp25.294.568	90%
						2.Pembinaan dan Pengembangan Media Tradisional	Rp-	Rp-	0%
						3.Penayangan Dialog Interaktif pada Media Televisi	Rp18.300.000	Rp14.000.000	77%
						4. Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	Rp221.722.000	Rp218.441.039	99%
						5.Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron	Rp320.023.880	Rp317.496.069	99%
						6.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Rp88.580.960	Rp88.317.309	100%

						7.Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp1.730.000.000	Rp1.707.923.900	99%
3.	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	30%	33%	110%	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah			
						1.Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Rp26.995.000	Rp20.899.200	77%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKJIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang sangat memuaskan dengan tingkat capaian rata rata di atas 100%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan ini adalah cukup tingginya komitmen dan dari Kepala Daerah dan dukungan dalam hal kebijakan untuk merealisasikan ketersediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pondasi dasar kesiapan kota Padang Panjang menjadi kota yang cerdas “Smart City” .

B. Saran

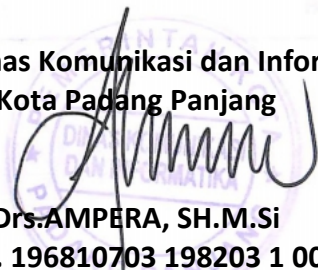
Dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang menjadi “Smart City” , ada beberapa hal perlu ditindaklanjuti terkait pencapaian kinerja Dinas Kominfo di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Masih perlunya dukungan anggaran dan SDM TI yang mumpuni guna meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Infrastruktur jaringan, terkait banyaknya keluhan terkait lemahnya koneksi jaringan atau unit-unit kerja yang belum terkoneksi jaringan.
2. Perlunya koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi yang intens antara OPD dengan dinas Kominfo terkait penatalaksanaan TI guna percepatan pelaksanaan e-government .

Selanjutnya, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika sekalligus sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Padang Panjang, Januari 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**



Drs. AMPERA, SH.M.Si

NIP. 196810703 198203 1 00